

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam setiap penelitian mengenai ketahanan pangan banyak mengupas dari berbagai sisi. Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian, melihat sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan dan melihat alur pengerjaan penelitian. Agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui tahap-tahap bagian yang telah dilakukan dan mengembangkan penelitian yang terdahulu sesuai dengan tema penelitian yang diteliti.

Pada penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Tuban, dalam hal ini peneliti (Taufiq, 2010) menggunakan model teoritis, model teoritis ini disusun untuk mengetahui pengaruh besaran tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala keluarga terhadap pengeluaran konsumsi dengan menggunakan model pengeluaran fungsi Engel. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yakni dengan menggunakan uji hipotesis secara simultan (uji F) maupun uji secara pasrial (uji t) diketahui bahwa pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga dan jenis pekerjaan kepala keluarga berpengaruh secara nyata terhadap konsumsi beras maupun konsumsi non beras. Kecenderungan diversifikasi bahan pangan masyarakat tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan sehingga akan menyebabkan ketergantungan semakin besar hanya pada perubahan variabel terikat konsumsi non beras (jagung dan gapek).

Berdasarkan penelitian Purnamasari (2011) mengenai pola konsumsi pangan rumah tangga petani lahan kering di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitas dengan menggunakan parameter Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) dan kualitas dengan menggunakan parameter Pola pangan Harapan (PPH), kemudian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dicapai adalah pola konsumsi pangan belum mencerminkan pola yang beragam, bergizi dan berimbang. Terlihat dari kuantitas konsumsi pangan (energi dan protein) sebesar 1622,05 kkal/kap/hr AKE dan 49,52 gram/kap/hari untuk

AKP. Kualitas keberagamannya ditunjukkan dari skor PPH sebesar 45,93 yang mengindikasikan bahwa pola konsumsi di daerah penelitian belum beragam dan berimbang, yang kedua faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap PPH adalah pendapatan perkapita, sedangkan pendidikan ibu rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, keragaman pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga pekerja tidak signifikan terhadap PPH di daerah penelitian.

Penelitian Hanafie (2012) yakni peningkatan daya saing rumah tangga melalui perbaikan pola konsumsi pangan, yang bertujuan untuk mengetahui daya saing rumahtangga melalui identifikasi pola konsumsi pangan, meliputi konsumsi energi dan protein serta keragaman pangannya. Analisis yang digunakan adalah dengan metode penilaian konsumsi pangan yang meliputi perhitungan AKE, AKP, dan PPH untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan nilai normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga masing-masing sebesar 60,46% AKE dan 57,53% AKP dengan derajat keragaman konsumsi pangan sebesar 40,34 yang berarti tingkat konsumsi pangan rumahtangga masih harus ditingkatkan melalui komunikasi, edukasi dan informasi agar rumah tangga sebagai kelompok sosial terkecil dalam masyarakat memiliki daya saing untuk meningkatkan produktifitasnya.

Sukandar, *dkk.* (2006) melakukan studi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin dan tidak miskin. Hasil studi ini menyatakan daerah penelitian yakni Bogor dan Indramayu tergolong rawan pangan dikarenakan indikator konsumsi energi dan proteinnya kurang dari 70%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga adalah jumlah anggota keluarga dan umur suami. Sementara itu, Sukiyono, *dkk.* (2009) menggunakan indikator ragam pangan sebagai indikator ketahanan pangan rumah tangga serta melihat pengaruh faktor penentu pada tingkat ketahanan rumah tangga.

Pada pemaparan diatas, terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kecukupan gizi dan belum beragamnya pangan yang dikonsumsi. Banyak faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pada setiap daerah penelitian yang menyebabkan pemenuhan gizi dalam rumah tangga masih belum memenuhi nilai angka normatifnya. Pada konsep ketahanan pangan, dapat dikatakan bahwa hasil pemaparan beberapa penelitian terdahulu tersebut belum dapat dikatakan daerah

yang tahan pangan, dikarenakan masih belum terpenuhinya standar kecukupan gizi dan belum beragamnya pangan yang dikonsumsi. Pada penelitian ini akan digunakan indikator kecukupan energi dan kecukupan protein untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan serta menilai kecukupan gizi yang merupakan *output* dari keberhasilan ketahanan pangan dan digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat ketahanan rumah tangga daerah penelitian berdasarkan kedua indikator yang telah disebutkan.

2.2. Definisi Pangan dan Pengelompokan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Menurut Saliem, dkk (2002), untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Menurut Karsin (2004), pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja.

Harper, *et.al.* (1986) menyatakan bahwa pangan telah dikelompokkan menurut berbagai cara yang berbeda dan berikut merupakan salah satu cara pengelompokannya, yakni:

1. Padi-padian
2. Akar-akaran, umbi-umbian dan pangan berpati
3. Kacang-kacangan dan biji-bijian berminyak
4. Sayur-sayuran
5. Buah-buahan
6. Pangan hewani
7. Lemak dan minyak

8. Gula dan sirup

Sedangkan berdasarkan Departemen Kesehatan (2000), mengelompokkan pangan ke dalam delapan kelompok pangan, yaitu :

1. Padi-padian
2. Umbi-umbian
3. Minyak/lemak
4. Pangan hewani
5. Kacang-kacangan
6. Buah/biji berminyak
7. Gula
8. Sayur-sayuran/buah

2.3. Tinjauan Umum Ketahanan Pangan

2.3.1. Definisi Ketahanan Pangan

Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) dalam Hanani (2009) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan pangan yang sering menjadi acuan, diantaranya :

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997): situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

4. FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selernya (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. Mercy Corps (2007): keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selernya untuk hidup produktif dan sehat.

Menurut Hanani (2009), berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu.
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses.
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial.
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi.
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Soemarno (2009) berpendapat bahwa ketahanan pangan merupakan suatu wujud dimana masyarakat mempunyai pangan yang cukup di tingkat wilayah dan juga di masing-masing rumah tangga, serta mampu mengakses pangan dengan cukup untuk semua anggota keluarganya, sehingga mereka dapat hidup sehat dan bekerja secara produktif. Ada dua prinsip yang terkandung dalam ketahanan pangan, yaitu tersedianya pangan yang cukup dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan. Rumah tangga dalam konteks ini adalah semua rumah tangga masyarakat baik rumah tangga petani dan maupun rumahtangga non-petani. Ketahanan pangan mensyaratkan bahwa setiap rumah tangga dapat mengkonsumsi pangan secara cukup. Standar kecukupan dalam mengkonsumsi sekitar 2000 kalori dan ketersediaan 2.500 kalori. Standar kecukupan pangan dinyatakan dalam satuan kalori dan protein (akan terus direvisi standarnya); sedangkan pola pangan harapan merupakan kombinasi konsumsi (kalau dinilai dengan skor 100 berarti sudah cukup beragam dalam mengkonsumsi) bahan-bahan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dst.

Menurut Syarief (2004), ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama upaya peningkatan status gizi masyarakat yang paling erat kaitannya dengan pembangunan pertanian. Situasi produksi pangan dalam negeri serta ekspor dan impor pangan akan menentukan ketersediaan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan tingkat wilayah. Sementara ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, akan ditentukan pula oleh daya beli masyarakat terhadap pangan.

Hariyadi, Syah dan Winarno (2009) mengemukakan bahwa kondisi ketahanan pangan suatu negara yang diukur dengan berbagai indikator, akhirnya akan bermuara pada status kesehatan dan aktivitas produktif individu rakyatnya. Demikian, tidak ada suatu negara yang dapat dikatakan mempunyai status ketahanan pangan yang sempurna jika masih ada bagian masyarakatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi minimal yang diperlukan untuk sehat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Secara relatif, tingkat ketahanan pangan suatu negara bisa ditentukan dari status gizi masyarakatnya, sehingga bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menjamin akses rakyatnya terhadap pangan. Walaupun suatu negara mampu menjamin ketersediaan dan akses setiap warga negaranya terhadap pangan yang bermutu, aman, dan bergizi, namun bisa saja negara masih memiliki potensi kerawanan pangan, terutama dalam kaitannya dengan ketergantungan impor.

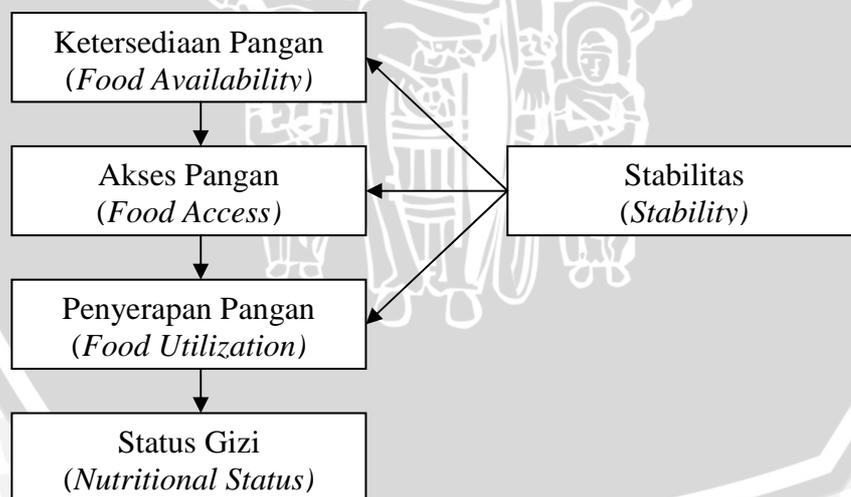
Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996 *dalam* Hanani (2009), pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Seperti halnya pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

2. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
3. Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
4. Terpenuhiya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan, yaitu: 1) ketersediaan, yang artinya bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; 2) distribusi, dimana pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; 3) konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem ketahanan pangan di atas.

2.3.2. Subsistem Ketahanan Pangan



Sumber : USAID, (1999) dan Weingartner (2004) dalam Hanani (2009)

Gambar 1. Subsistem Ketahanan Pangan

Hanani (2009) mengemukakan bahwa subsistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan,

sedangkan status gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan. Subsystem ketahanan pangan dapat dilihat pada Gambar 1.

1. Subsystem ketersediaan (*food availability*)

Ketersediaan pangan menurut Hanani (2009) memiliki pengertian yakni merupakan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

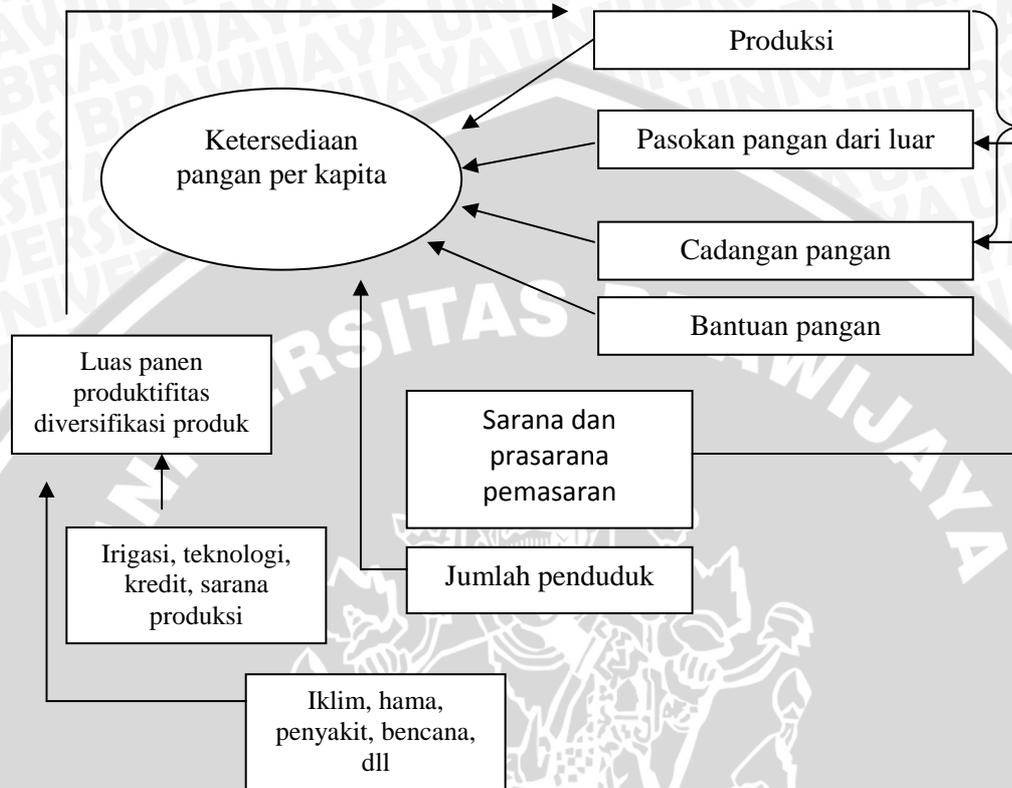
Baliwati & Roosita (2004) mengemukakan bahwa ketersediaan pangan merupakan kondisi penyediaan yang cukup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan serta turunannya, bagi penduduk suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang berjenjang, mulai dari nasional, provinsi (regional), lokal (kabupaten/kota), dan rumah tangga/individu. Ketersediaan pangan dapat diukur pada tingkat makro (nasional), meso (provinsi, kabupaten/kota) maupun tingkat mikro (rumah tangga).

Sedangkan menurut Priswanti (2004), ketersediaan pangan didefinisikan sebagai rata-rata konsumsi energi, protein, dan zat gizi lainnya per kapita per hari, yang diperoleh dari konsumsi bahan makanan keluarga tiap harinya, baik dalam rumah maupun diluar rumah tanpa memperhitungkan makanan yang terbuang, sisa ataupun yang diberikan kepada binatang peliharaan, yang diperoleh dengan wawancara menggunakan metode pendaftaran makanan dengan kuesioner terstruktur yang memuat daftar makanan utama.

Suryana (2004), mengemukakan bahwa subsystem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas, dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.

Menurut Baliwati & Roosita (2004), komponen ketersediaan pangan meliputi kemampuan produksi, cadangan, maupun impor pangan setelah dikoreksi dengan

ekspor dan berbagai penggunaan seperti untuk bibit, pakan, industri makanan/non pangan, dan tercecer. Berikut merupakan skema mengenai subsistem ketersediaan pangan yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers. 2003 (dimodifikasi) dalam Hanani (2009)

Gambar 2. Subsistem Ketersediaan Ketahanan Pangan

Menurut Baliwati (2007), ketersediaan pangan suatu wilayah dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadang pangan. Impor pangan merupakan alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antar produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri.

2. Subsistem akses pangan (*food access*)

Hanani (2009) mengemukakan bahwa subsistem akses pangan memiliki pengertian yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada

pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan. Subsistem akses pangan dapat dilihat pada Gambar 3.

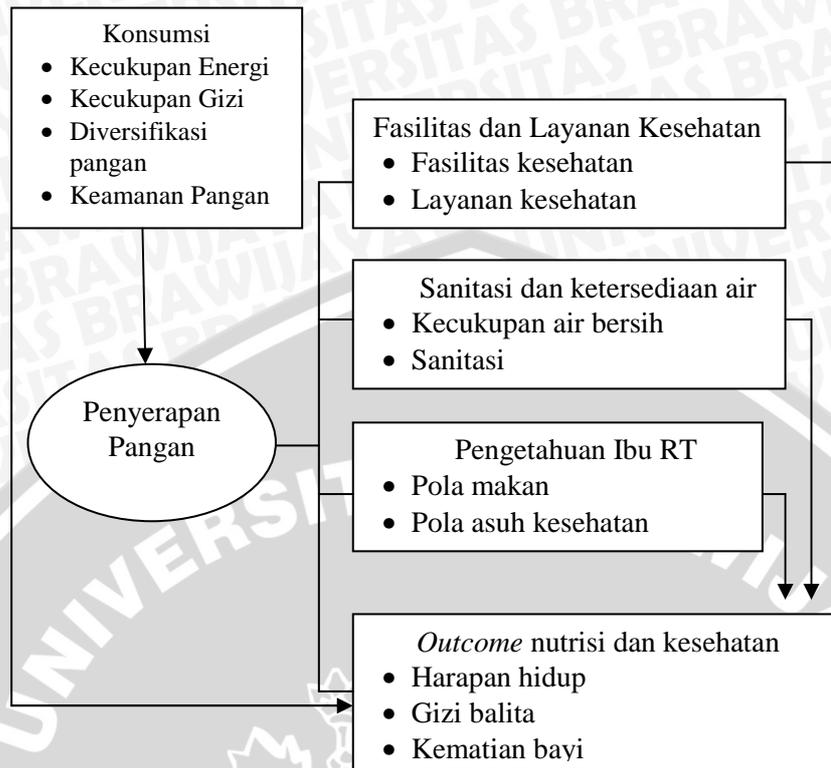


Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers. 2003 (dimodifikasi) dalam Hanani (2009)

Gambar 3. Subsistem Akses Pangan

3. Subsistem penyerapan pangan (*food utilization*)

Riely *et.al*, 1999 dalam Hanani (2009) berpendapat bahwa penyerapan pangan memiliki pengertian yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita. Subsistem penyerapan pangan dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber : Patrick Webb and Beatrice Rogers. 2003 (dimodifikasi) dalam Hanani (2009)

Gambar 4. Subsistem Penyerapan Pangan

4. Subsistem stabilitas (*stability*)

Maxwell and Frankenberger (1992) dalam Hanani (2009) berpendapat bahwa subsistem stabilitas merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*) dan kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.

5. Subsistem status gizi (*nutritional status*)

Hanani (2009) berpendapat bahwa pengertian dari subsistem status gizi adalah *outcome* ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya status gizi ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Badan Ketahanan Pangan (2013), mengemukakan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut.

1. *Subsistem ketersediaan pangan*, mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.
2. *Subsistem distribusi pangan*, mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat. Surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.
3. *Subsistem konsumsi pangan*, menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan pangan dan gizi yang cukup dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas dan produktif. Pada subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi. Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi dapat memicu instabilitas apabila pasokan pangan tersebut terganggu. Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu peningkatan cita rasa, penampilan dan kepraktisan

pengolahan pangan agar dapat bersaing dengan produk-produk yang telah ada.

Dalam kaitan ini peranan teknologi pengolahan pangan sangat penting.

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan keharmonisan dari ketiga subsistem tersebut (Hardinsyah, Dodik Briawan, Retnaningsih, Tin Herawati dan Retno Wijaya, 2002). Pembangunan subsistem ketersediaan pangan diarahkan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan, yang berasal dari produksi, cadangan dan impor. Pembangunan subsistem distribusi pangan bertujuan menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan. Pembangunan subsistem konsumsi bertujuan menjamin setiap rumah tangga mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, bergizi dan aman. Keberhasilan pembangunan masing-masing subsistem tersebut perlu didukung oleh faktor ekonomi, teknologi dan sosial budaya, yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi.

2.3.3. Indikator Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses dan penyerapan pangan merupakan subsistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi, maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Hanani, 2009).

Berdasarkan pengertian di atas, maka telah banyak ahli yang menyusun indikator ketahanan pangan. indikator memang harus disusun untuk memudahkan menyusun tujuan, sasaran, strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja pembangunan ketahanan pangan. Berikut akan disajikan tentang indikator ketahanan pangan yang telah mengacu dari berbagai referensi (Hanani, 2009).

Tabel 1. Indikator Ketahanan Pangan

Subsistem	Indikator	Standar Ideal
Ketersediaan pangan	Ketersediaan energi perkapita	Ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilokalori/hari
	Ketersediaan protein perkapita	Ketersediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari
	Cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan minimal 20 persen dari kebutuhan
Akses pangan	Stabilitas harga pangan	Stabilitas harga pangan dengan perbedaan maksimum 10-25 persen antara waktu normal dan tidak normal
	Akses terhadap sistem informasi dan kewaspadaan pangan	Adanya sistem informasi harga pangan
		Sistem kewaspadaan pangan dan gizi berkembang sampai desa
	Pengeluaran untuk pangan	Persen pengeluaran pangan < 80 persen pendapatan
	Akses terhadap transportasi	Tersedia angkutan umum
Penyerapan pangan	Kecukupan Energi per kapita/hari	Angka kecukupan Energu minimal 2.000 kkal/hari
	Kecukupan Protein per kapita/hari	Angka Kecukupan Protein minimal 52 gram/hari
	Kecukupan gizi mikro	Kecukupan zat besi, yodium, dll
	Penganekaragaman pangan	Pola Pangan Harapan dengan skor PPH 100
	Penurunan kasus keracunan pangan	Jumlah kasus pelanggaran produk 0 persen
Status Gizi	Tingkat kerawanan masyarakat (<70% AKG)	Persen kelaparan < 2,5 persen
	Balita gizi kurang dan buruk	Persen balita gizi kurang dan buruk 2,5 persen

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, dalam Hanani (2009)

2.4. Pola Konsumsi Pangan

Menurut Soemarno (2009), konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun diversifikasi, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi

keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera; sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menyediakan energi bagi tubuh, proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan. Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh faktor-faktor: jenis pangan, jumlah / produksi pangan dan ketersediaan pangan. Tingkat konsumsi lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas bahan pangan. Kualitas pangan mencerminkan zat gizi esensial yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Pola konsumsi pangan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai jenis, frekuensi dan jumlah bahan pangan yang dimakan tiap hari oleh satu orang atau merupakan ciri khas untuk sesuatu kelompok masyarakat tertentu (Santoso, 2004).

Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pola konsumsi pangan di Indonesia masih belum sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam pola pangan harapan. Konsumsi dari kelompok padi-padian (beras, jagung, terigu). Masih dominan baik di kota maupun di desa namun perlu diwaspadai bahwa jenis konsumsi pangan yang bersumber lemak, minyak dan gula sudah berlebihan. Kelebihan dari kedua pangan ini akan membawa dampak negatif bagi kesehatan terutama penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung dan diabetes (Ariani, 2004).

Suyastiri (2008), berpendapat bahwa konsumsi pangan merupakan jumlah pangan (tunggal dan beragam) yang dikonsumsi oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Dalam aspek gizi, tujuan mengkonsumsi pangan adalah untuk memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan tubuh. Pola konsumsi pangan atau kebiasaan makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang

memilih pangan dan memakannya sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh psikologis, budaya dan sosial.

Pangan atau makanan yang dikonsumsi pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan kehidupan manusia yaitu sebagai sumber energi dan pertumbuhan serta mengganti jaringan atau sel tubuh yang rusak. Menurut Sediaoetama (2001), tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan. Kualitas makanan menunjukkan adanya zat gizi yang diperlukan tubuh didalam susunan hidangan dan perbandingannya terhadap satu dan lainnya. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. tingkat konsumsi individu dapat mempengaruhi status gizinya.

Cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh manusia, secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi (kalori) yang dikandungnya. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak dan protein yang ada di dalam bahan makanan (Almatsier, 2003).

1. Pengukuran pola konsumsi pangan

Pengukuran konsumsi pangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *recall* 24 jam. Metode ini digunakan untuk memperkirakan jumlah pangan dan minuman yang dimakan oleh seseorang selama 24 jam yang lalu atau sehari sebelum wawancara dilakukan. Dengan metode ini akan diketahui besarnya porsi pangan berdasarkan ukuran rumah tangga (URT), kemudian dikonversi ke ukuran metrik (gram) (Riyadi, 2003).

Metode *recall* memiliki keunggulan yaitu murah dan tidak memakan waktu banyak. Kekurangannya adalah data yang dihasilkan kurang akurat karena mengandalkan ingatan seseorang yang terbatas dan tergantung dari keahlian tenaga pencatatan dalam mengkonversikan URT menjadi satuan berat (gram) (Kusharto dan Sa'diyah, 2006).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu pola konsumsi pangan dalam memantapkan ketahanan pangan rumah tangga adalah sangat kompleks. Menurut Koentjaraningrat (1984) dalam Khumaidi (1994), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pangan antara lain dipengaruhi oleh karakteristik individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan,

pengetahuan gizi, selera dan sebagainya), lingkungan sosial (informasi, interaksi sosial rumah tangga, dan sebagainya), ekonomi (pendapatan, harga pangan, produksi pangan, dan sebagainya), budaya (agama, etnis, kepercayaan, identitas suku, dan sebagainya), fisiologi alam (kondisi cuaca, musim, perdesaan, perkotaan, dan sebagainya) dan perkembangan teknologi.

Menurut Widadie (2008) untuk lebih mudah memahami akan kompleksitas faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi, maka kesemua faktor tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan asal dan letak posisinya pada bagian karakteristik suatu rumah tangga, yaitu terdiri atas karakteristik internal dan karakteristik eksternal. Karakteristik internal rumah tangga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pangan yang berasal dari dalam struktur rumah tangga. Hal ini merupakan suatu karakteristik atau ciri khusus yang melekat pada rumah tangga dan memberikan pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi pangan yang berasal dari internal struktur rumah tangga.

Karakteristik ini seperti umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, selera, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, suku, agama, dan sebagainya. Sedangkan karakteristik eksternal rumah tangga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pangan yang berasal dari lingkungan luar rumah tangga. Hal ini merupakan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang melekat pada rumah tangga yang pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi berasal dari lingkungan luar rumah tangga. Karakteristik ini misalnya seperti harga pangan, penerimaan informasi, bantuan sosial pemerintah, subsidi, cuaca, musim, fisiologi alam, kondisi agronomis, geografis, dan sebagainya.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka hanya dipilih beberapa variabel saja yang dirasa memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi baik yang berasal dari karakteristik internal rumah tangga maupun karakteristik eksternal rumah tangga. Variabel karakteristik internal rumah tangga antara lain pendidikan yang meliputi pendidikan ibu rumah tangga, pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan pendapatan perkapita. Sedangkan variabel karakteristik eksternal rumah tangga antara lain sumber informasi pangan dan gizi dan pemanfaatan pekarangan. Berikut adalah

penjelasan mengenai variabel-variabel yang diduga mempengaruhi perilaku konsumsi pangan dalam suatu rumah tangga:

a. Karakteristik internal rumah tangga

Berikut merupakan penjelasan mengenai karakteristik internal rumah tangga yang meliputi :

1) Pendidikan

Riyadi (2003) menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang umumnya semakin tinggi pula kesadaran untuk memenuhi pola konsumsi yang seimbang dan memenuhi syarat gizi serta selektif dalam kaitannya tentang ketahanan pangan.

Menurut Suyastiri (2008), pola konsumsi pangan tergantung pada pendidikan rumah tangga, bahwa semakin tinggi pendidikan formal masyarakat maka pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan akan menyebabkan semakin bervariasinya pangan yang dikonsumsi, dengan bervariasinya pangan yang dikonsumsi tentunya kebutuhan gizi dan kesehatan anggota rumah tangga akan semakin baik.

Menurut Sumarwan (1993), tingkat pendidikan formal kepala keluarga juga berpengaruh terhadap pola konsumsi keluarga. Pendidikan dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah ia dapat menerima informasi dan inovasi baru yang dapat merubah pola konsumsinya.

2) Pengetahuan pangan dan gizi

Secara umum perilaku konsumsi makanan seseorang atau keluarga sangat erat dengan wawasan atau cara pandang yang dimiliki terhadap (sistem) nilai tindakan yang dilakukan. Jika ditelusuri lebih lanjut, sistem nilai tindakan itu dipengaruhi oleh pengalaman pada masa lalu yang berkaitan dengan pelayanan gizi/kesehatan/KB, ciri-ciri sosial yang dimiliki (umur, jenis/golongan etnik, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya), dan informasi pangan, gizi dan kesehatan yang pernah diterimanya dari berbagai sumber (Susanto, 1994). Kebudayaan memberikan nilai sosial pada makanan karena ada makanan yang dianggap

mempunyai nilai sosial tinggi dan ada pula nilai sosial yang rendah (Soemarwoto 1994).

Khomsan (2002) menyatakan bahwa walaupun rumah tangga memiliki daya beli cukup dan pangan juga tersedia, namun bila pengetahuan pangan dan gizinya masih rendah maka akan sulit bagi rumah tangga yang bersangkutan untuk dapat memenuhi kecukupan pangannya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam memilih menu makanan yang mempunyai kandungan energi dan protein yang memadai serta pemilihan komposisi jenis makanan yang tepat, diperlukan tingkat pengetahuan yang relatif tinggi, terutama tingkat pengetahuan kepala keluarga dan istri yang berperan sangat penting dalam menentukan keputusan konsumsi rumah tangga (Djauhari dan Friyanto 1993).

3) Jumlah anggota rumah tangga

Suyastiri (2008) berpendapat bahwa jika jumlah anggota rumah tangga akan mempengaruhi pola konsumsi pangan berbasis potensi lokal. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka kebutuhan pangan yang dikonsumsi akan semakin banyak dan bervariasi karena masing-masing anggota rumah tangga mempunyai selera yang berbeda.

Jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kecukupan konsumsi pangan pada suatu rumah tangga. Bagi rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang banyak, jumlah anggota rumah tangga biasanya adalah faktor penentu dalam memilih jenis bahan makan dan distribusi pangan antara anggota keluarga. Biasanya pada kondisi tersebut, faktor kuantitas lebih diutamakan dari pada faktor kualitas, sehingga diharapkan seluruh anggota keluarga dapat terbagi secara merata (Djauhari dan Friyanto, 1993).

Selain itu juga menurut Sumarwan (1993), jumlah anggota keluarga atau ukuran keluarga juga mempengaruhi pola konsumsi. Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan. Sebaliknya, keluarga akan mengalokasikan sisa pendapatannya untuk konsumsi bukan makanan. Maka

dengan demikian, keluarga dengan jumlah anggota sedikit relatif lebih sejahtera dari keluarga dengan jumlah anggota besar.

4) Pendapatan perkapita

Pangan pokok merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada berbagai tingkat pendapatan. Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berbeda menurut kuantitas dan kualitas pangan berbeda. Pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan perilaku rumah tangga dalam menentukan pola konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan. Secara umum dengan adanya kenaikan pendapatan akan memberikan pilihan bagi setiap rumah tangga untuk melakukan diversifikasi konsumsi pangan, meningkatkan kualitas bahan pangan pokok dalam upaya meningkatkan gizi keluarganya. Bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah sebagian besar pendapatannya akan digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan primer. Pola konsumsi rumah tangga yang berpendapatan rendah lebih mengarah pada pangan pokok yang sesuai dengan pangsa pengeluaran yang dialokasikan untuk konsumsi pangan, dan variasi pangan kurang diperhatikan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan gizinya masih perlu dipertanyakan. Berbeda dengan rumah tangga yang berpendapatan tinggi, mereka cenderung untuk mengonsumsi pangan yang bervariasi dan meningkatkan kualitas pangannya dengan cara membeli bahan pangan yang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi (Suyastiri, 2008).

Menurut Ritche (1967) diacu dalam Nurfarma (2005), faktor ekonomi dan penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi pangan. Salah satu ukuran keadaan ekonomi rumah tangga adalah pendapatan atau pengeluaran rumah tangga. Menurut Suhardjo (1989), pola konsumsi pangan keluarga dipengaruhi antara lain oleh pola makanan sebagian besar penduduk sekitarnya, ketersediaan bahan pangan, dan tingkat pendapatan keluarga.

Menurut Nicholson (1991), hukum *Engel* menyatakan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pangan pokok, sebaliknya, rumah tangga yang berpendapatan tinggi hanya akan membelanjakan sebagian kecil saja dari total pengeluaran untuk kebutuhan pokok.

Menurut Sumarwan (1993), faktor-faktor yang menentukan pola konsumsi keluarga antara lain tingkat pendapatan keluarga, ukuran keluarga, pendidikan kepala keluarga dan status kerja wanita. Untuk mendukung pernyataan tersebut, telah banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan dan pola konsumsi keluarga. Teori Engel's yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga semakin rendah persentasi pengeluaran untuk konsumsi makanan. Berdasarkan teori klasik ini, maka keluarga bisa dikatakan lebih sejahtera bila persentasi pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dari persentasi pengeluaran untuk bukan makanan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil dengan bertambahnya pendapatan keluarga, karena sebagian besar dari pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan.

b. Karakteristik eksternal rumah tangga

1) Sumber informasi tentang pangan dan gizi

Pada sumber informasi, dengan semakin sering dan mudahnya informasi yang diterima oleh ibu rumah tangga, tentu akan semakin memperbesar tingkat pemahamannya mengenai gizi. Menurut Margono (1978) dengan semakin tinggi intensitas sumber informasi yang diterima oleh seseorang, maka proses terjadinya adopsi inovasi akan pesan dari informasi semakin besar. Adanya informasi yang diterima oleh rumah tangga, maka akan memberikan peluang besar bagi rumah tangga tersebut untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Adanya informasi akan semakin menambah pengetahuan individu manusia untuk lebih berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam menyongsong kehidupan.

Sumber informasi tersebut berasal dari media komunikasi (televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain), kelompok kelembagaan (pengajian, PKK, posyandu, dan lain lain), serta media personal (tenaga penyuluh, aparatur desa, dan lain-lain).

2) Pemanfaatan pekarangan

Menurut Suhardjo (2003), dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai cadangan makanan keluarga akan menambah sumber pendapatan keluarga dan menghemat pengeluaran belanja keluarga. Sedangkan menurut Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan (2003), lahan pekarangan sudah lama dikenal

dan memiliki multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan : (1) bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya; (2) sayur dan buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian; (5) bahan kerajinan tangan; (6) kayu bakar; (7) uang tunai. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, maka disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga serta menghasilkan bahan makanan dan komoditas pertanian yang berbasis pada lingkungan keluarga yang bukan saja merupakan tambahan bagi keluarga tetapi juga merupakan tambahan dalam penyediaan bahan pangan yang bergizi dan beraneka ragam.

2.5. Konsumsi Energi dan Protein

Hak atas kecukupan pangan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak asasi manusia. Aspek gizi memandang bahwa tujuan mengonsumsi pangan adalah memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan tubuh, sehingga bila hak atas pangan terpenuhi maka kualitas hidup yang baik mencakup status gizi dan kesehatan akan tercapai (Khomsan, 2002). Hardinsyah dan Martianto (1989) juga mengungkapkan bahwa agar hidup sehat secara berkelanjutan, manusia memerlukan sejumlah zat gizi. Zat gizi dapat diperoleh dari konsumsi pangan yang mencukupi kebutuhan tubuh untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan pertumbuhan tubuh.

Kekurangan zat gizi terutama energi dan protein pada tahap awal akan menimbulkan rasa lapar. Jika berlangsung cukup lama akan berakibat pada penurunan berat badan disertai dengan penurunan produktivitas kerja. Penanganan yang terlambat akan mengakibatkan mudah terkena infeksi yang dapat berakhir dengan kematian.

Hardinsyah dan Martianto (1989) mendefinisikan kebutuhan gizi sebagai kebutuhan minimal zat gizi agar dapat hidup sehat, sedangkan kecukupan gizi adalah jumlah masing-masing zat gizi yang sebaiknya dipenuhi seseorang agar hampir semua orang (minimal 97,5% populasi) hidup sehat. Angka kecukupan

energi dan protein berguna untuk mengukur tingkat dan perencanaan konsumsi. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004), Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 2000 kkal/kapita/hari sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 52 gram/kapita/hari.

Kinerja konsumsi pangan wilayah tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Kondisi konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Ukuran rumahtangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga (Baliwati, 2007).

Konsumsi pangan yang cukup merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan status gizi kurang dan buruk yang jika tidak diatasi akan mengakibatkan *lost generation* (Hardinsyah dan Martianto, 1992).

Menurut Sukandar (2007), tingkat kecukupan energi dan protein keluarga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan rumah tangga. Apabila seseorang atau kelompok orang (rumah tangga/keluarga) mengkonsumsi energi dan protein kurang dari 70% angka kecukupan (*recommended dietary allowance*), maka seseorang atau kelompok orang (rumah tangga/keluarga) tersebut dikatakan konsumsi pangannya kurang/tidak cukup dan tergolong rawan pangan (tidak tahan pangan). Departemen Kesehatan (1996) mengklasifikasikan tingkat kecukupan energi dan protein ke dalam lima golongan, yaitu defisit tingkat berat (<70%), defisit tingkat sedang (70-79%), defisit tingkat ringan (80-89%), normal (90-119%) dan lebih (>120%).

Menurut pendapat Gummay (2012), untuk mengukur Angka Kecukupan Gizi (AKG) digunakan parameter Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). Tingkat konsumsi energi dan protein merupakan dua indikator mutu gizi yang umum digunakan untuk mengukur status gizi. Sesuai rekomendasi, AKE dan AKP agar seseorang dapat hidup sehat dan dapat aktif menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif masing-masing adalah sebesar 2000 kkal/kapita/hari (untuk energi) dan 52 gram/kapita/hari untuk protein

(WNPG VIII, 2004). Menurut Hanani (2012) dalam *E-Journal* Ekonomi Pertanian telah dilakukannya penurunan standar kecukupan energi (AKE) yang diamanatkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004 dimana AKE yang semula 2100 kkal/kap/hr turun menjadi 2000 kkal/kap/hr.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2012), tujuan utama dalam penyusunan AKG adalah sebagai acuan untuk perencanaan dan penilaian konsumsi pangan dan gizi bagi orang sehat agar tercegah dari kekurangan atau kelebihan asupan gizi. AKG ini juga digunakan untuk merencanakan bantuan makanan dalam rangka program kesejahteraan rakyat, merencanakan konsumsi pangan individu, keluarga maupun penduduk, mengevaluasi tingkat kecukupan penyediaan pangan untuk kelompok tertentu, menilai status gizi masyarakat, serta merencanakan fortifikasi makanan. Energi dan protein digunakan sebagai indikator dari pengukuran gizi kerana penggunaan nilai kalori (energi) dan nilai protein sudah cukup untuk menggambarkan kecukupan pangan rumah tangga karena konsumsi kalori terkait erat dengan kemampuan manusia untuk memulihkan sel-sel tubuh yang rusak pada usia dewasa atau untuk menjamin pertumbuhan normal pada usia muda (Malassis dan Ghersi (1992) dalam Irawan (2002)).

Dalam penelitian ini, nilai energi dan nilai protein aktual didapat dari perhitungan jumlah asupan bahan makanan yang dimakan oleh setiap rumah tangga dalam satu hari yang dikonversikan kedalam gram sesuai dengan ukuran rumah tangga dan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan.